

PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TOMPASO BARAT

Roy Cipta Porajow¹

Ronny Gosal²

Ventje Kasenda³

Abstrak

Profesionalisme Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang terpenting khususnya dalam pelayanan publik untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam organisasi pemerintahan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat. Aparatur Sipil Negara sangatlah penting dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan pembangunan dan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangatlah dibutuhkan profesionalisme para aparatur sipil negara yang bekerja pada suatu instansi pemerintahan, agar kinerjanya memuaskan dan dapat dikatakan maksimal serta sesuai dengan harapan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Tompaso Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa kreatifitas ASN yang ada di Tompaso Barat sudah sesuai dengan Standar operasional yang ada dalam pelaksanaan tugas pemerintahan baik dari segi pelayanan maupun keahlian yang dimiliki dalam setiap tugas yang dilaksanakan. Inovasi ASN yang ada di Kecamatan Tompaso sudah baik lewat pelayanan yang diberikan akan tetapi ketersediaan sumber daya harus ditambah mengingat dalam tugas pemerintahan sering ada tugas baru sehingga sumber daya ASN perlu ditambah lagi.

Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara, Tugas Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Asas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan kecamatan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kecamatan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi kecamatan. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik secara terus menerus. Good Governance sendiri dipahami sebagai praktik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik yang tidak semata-mata didasarkan kepada pemerintah atau negara saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik internal birokrasi maupun diluar birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan Profesionalisme dari Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni profesi aparatur dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Aparatur Sipil Negara sebagai unsur pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan dengan masyarakat dalam memberikan

pelayanan. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Tompaso Barat yang direncanakan sebagai tempat penelitian masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Teori

Istilah Profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam Bahasa Inggris *professio* memiliki arti sebagai berikut: *vacation or occupation requiring advanced training in some liberal an or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing etc*, (Webster dictionary, 1960:1163) suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain).

Menurut Siagian (2000:163) Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mututinggi, waktu yang cepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

1. Kreatifitas (creativity).

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada

birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif, adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu basil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

2. Inovasi (innovasi).

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap basil pekerjaan yang telah dicapai.

3. Responsifitas (responsivity).

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu faktor yang menghambat adalah tidak profesionalnya kelancaran dan efektifitas birokrasi publik aparatur birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik Indonesia dapat dilihat dari banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi masyarakat di lapangan tentang pelayanan publik yang diselenggarakan birokrasi. Lambannya birokrasi dalam merespon aspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural (red tape) merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi publik Indonesia.

Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkan profesionalisme aparatur sering terbentur dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan. Pendapat tersebut meyakini bahwa Sistem kerja birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi tidak responsif serta tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah (kultdisator) dan pemberdayaan bagi bawahan.. Demikian juga apa yang dikatakan oleh korten dan alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto (1996:178) yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”.

Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksible, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas dalam memerlukan pengetahuan dan

keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Terbentuknya kemampuan dan keahlian juga harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel.

Sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi aparat untuk bekerja secara profesional sertamampu merespon perkembangan global dan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang reponsif, inovatif, efektif, dan mengacu kepada visi dan organisasi.

Dalam pandangan Tjokrowinoto (1996:190) birokrasi dapat dikatakan profesional atau tidak, diukur multi kompetensi sebagai berikut: Profesionalisme yang Wirausaha (Entrepreneurial Professionalism). Kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

keberanian mengambil risiko dalam memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk ngambil resiko dalam memanfaatkan peluang, dan kemampuan untuk menggeser alokasi sumber kegiatan yang berproduktifitas rendah ke produktifitas tinggi yang terbuka dan memberikan peluang bagi terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional.

- a. Profesionalisme yang Mengacu Kepada Misi Organisasi (Mission-driven Professionalism).
- b. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang perlu dan mengacu kepada misi yang ingin dicapai (Mission-driven professionalism), dan tidak semata-mata mengacu kepada penuturan yang berlaku (rule-driven professionalism).
- c. Profesionalisme Pemberdayaan (Empowering-Profesionalism).
- d. Kemampuan ini diperlukan untuk aparat pelaksana atau jajaran bawah (grassroots) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik (service provider). Profesionalisme yang dibutuhkan dalam hal ini adalah profesionalisme-pemberdayaan (empowering-profesionalism) yang sangat berkaitan dengan gaya pembangunan.

Menurut Tjokrowinono (1996:193) menyatakan bahwa: Profesionalisme tidak hanya cukup dibentuk dan dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan agar aparat dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, akan tetapi juga turut dipengaruhi oleh filsafat-birokrasi, tata-nilai, struktur, dan prosedur-kerja dalam birokrasi.

Untuk mewujudkan aparat yang profesional diperlukan political will dari pemerintah untuk melakukan perubahan besar dalam organisasi birokrasi publik

agar dapat bekerja secara profesional dan responsif terhadap terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam filsafat atau dan pandang organisasi dalam mencapai tujuan yang dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi, membangun struktur yang flat clan tidak terlalu hirarkis serta prosedur kerja yang tidak terlalu terikat kepada aturan formal.

Menurut Solihin (2007): wujud nyata kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian dari prinsip profesionalisme dan kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkai kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indikator minimal untuk mengukur profesionalisme adalah kinerja tinggi, taat asas, kreatif dan inovatif, memiliki kualitas dibidangnya. Sedangkan perangkat pendukung indikator adalah kompetensi yang sesuai dengan fungsinya, kode, etik profesi, sistem reward an punishment yang jelas, sistem pengembangan sumber daya manusia ,dan standar indikator. Selanjutnya pendapat Siagian (2000:163), mengatakan, bahwa :“Profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.

Menurut pendapat di atas pegawai yang profesional akan handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bisa diikuti masyarakat yang dilayaninya. Supaya handal tentunya

dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang agar bisa melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki daya inovatif yang tinggi mengacu pada visi dan misi Organisasi. Sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Ancok (2000), bahwa: “Profesionalisme adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan nilai-nilai organisasi”. (control by vision and values).Pendapat di atas sungguh relevan dalam perkembangan global yang amat pesat kala ini, pegawai yang profesional adalah yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang cepat berubah agar bisa merespon kebutuhan dan kemauan yang diinginkan pelanggan dalam hal ini tentunya masyarakat banyak yang membutuhkan pelayanan.

Menurut Kartasasmita (1997:10), bahwa: “Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas profesinya”. Menanggapi pendapat di atas dapatlah kita maklumi, bahwa seseorang yang profesional dalam pekerjaannya perlulah suatu kesungguhan dalam bekerja yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam, mengerti dan paham atas apa yang akan dilakukan dan yang telah dilaksakannya dalam pekerjaan yang digelutinya, sehingga apa yang diterapkannya dalam bekerja sehari-hari akan menghasilkan keluaran yang memberikan arti dan kepuasan bagi yang membutuhkannya dan bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat

dipertanggungjawabkan kapan dan dimanapun saat dibutuhkan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (1994), bahwa: "Ada tiga faktor utama dalam menentukan kemampuan suatu unit organisasi Sekretariat Kota/kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu personil, pembiayaan, dan perlengkapan". Ketiga hal tersebut acapkali menjadi kendala bagi sebuah organisasi publik yang harus dihadapi, tidak jarang menemui keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari". Dapat dilihat betapa pentingnya unsur personil sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat banyak, namun merupakan kendala yang cukup berarti yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menyikapinya dengan sungguh-sungguh dan seksama. Selanjutnya Bryan and White (1987) juga mengemukakan hal seperti tersebut di atas, bahwa: "Pemerintah lokal menghadapi kendala-kendala institusional dalam menyelenggarakan tugas pemberian pelayanan dan jasa pemerintah. Kurangnya staf, pembiayaan dan wewenang yang mengakibatkan sedikitnya sumber daya yang dapat digunakan oleh Pemerintah lokal untuk menjawab tantangan itu". Untuk mengukur profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah suatu hal yang mudah dalam rangka mencapai tujuan organisasi seiring dengan misi yang diemban. Ada berbagai pendapat untuk mengukur profesionalisme.

Secara etimologi pemerintahan menurut Ermaya Suradinata (1998:10), pemerintahan berasal dari kata

1. Pemerintah berarti menyeluruh untuk melaksanakan suatu pekerjaan,
2. Pemerintah berarti lembaga atau badan yang melaksanakan fungsi pemerintah,
3. Pemerintah berarti kegiatan, perbuatan, cara atau urusan badan lembaga pemerintahan tersebut.

Selanjutnya Ermaya suradinata mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit dimana pemerintah dalam arti sempit yaitu (eksekutif) sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah lembaga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan dan yang melaksanakan peradilan.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie, secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan dan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan pe- menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran -an menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, hal atau badan yang memerintah tersebut dalam suatu institusi Inu Kencana Syafie (1996:4).

Pemerintahan adalah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki

objek baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Disebut penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif. Sugiyono (2010:20). Hadari Nawawi(2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable) mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas dalam usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan membiarkan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan ditinjau berdasarkan indikator-indikator Kreatifitas, Inovasi, dan Responsifitas (Siagian 2000:163).

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut penulis menggunakan "purposeful sampling" atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan

oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). informan dalam penelitian ini adalah: Camat, Sekertaris Camat, masyarakat.

Hasil Penelitian

1. Profesionalisme ASN ditinjau dari Kreatifitas

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kreatifitas merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan tentunya peran ASN sebagai pelaksana harus terampil melihat kebutuhan masyarakat dari hasil wawancara dengan Camat beliau mengatakan pelaksanaan tugas pemerintahan ASN yang ada dikecamatan Tompaso Barat sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dimana kreatifitas aparatur sipil negara sudah baik ini dapat dilihat dari proses pelayanan yang diberikan baik pelayanan administrasi yang menjadi prioritas utama kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tompaso Barat.

Tentunya juga prosedur merupakan bagian terpenting dalam setiap tugas yang diberikan standar dan mutu yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku keahkliaan merupakan kemampuan menjalankan setiap tugas dari wawancara dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan proses dan prosedur adalah hal terpenting disamping itu kreatifitas ASN yang ada menjadi indikator terpenting pembuatan surat, dan pelayanan administrasi lainnya sudah dilaksanakan sedemikian rupa dengan konsep dan efektifitas pelayanan yang tepat waktu, sasaran dan akurat.

Berdasarkan indikator Penelitian Kreatifitas ASN di Kecamatan Tompaso Barat mengikuti standar

operasional yang ada sehingga segala kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik diantaranya pelayanan kepada masyarakat maupun program program lain yang harus dilaksanakan.

2. Profesionalisme di tinjau dari Inovasi

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai. Dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan cara baru menjadi implikasi terpenting dalam menjalankan tugas yang ada oleh karena itu diperlukan inovasi yang dapat mempermudah proses kegiatan sehingga dalam proses pelayanan kepada masyarakat tidak akan menagalami kendala

Dalam penerapannya juga ASN dibekali dengan pelatihan pelatihan dari pemerintahan kabupaten dengan prosedur yang akan dilaksanakan dimana inovasi asumsi mendasarkan untuk melihat profesionalitas ASN dengan berlandaskan pada aturan aturan yang ada. Inovasi yang ada dikecamatan tompaso barat dai beberapa informan yang ada pada intinya telah mengacuh pada teknis yang dibaik dimana pemerintah kecamatan selalu membangun hubungan dengan pemerintahan desa sehingga program yang dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan camat Tompaso Barat beliau mengatakan Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan selalu membangun sinergitas Pemerintahan Kabupaten ketika ada perubahan khususnya dalam pelayanan yang dilaksanakan. Hal senada juga

disampaikan oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat dimana menurut beliau inovasi ASN di Kecamatan Tompaso Barat sudah sangat baik ini dapat dilihat dari program oleh masyarakat MS” menurut beliau dalam birokrasi untuk menciptakan hal inovasi dan model kerja yang baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan masyarakat harus disesuaikan dengan sumberdaya yang profesional akan tetapi sumber daya yang dimiliki oleh ASN harus dimaksimalkan karena dalam pelayanan masih ditemukan keterlambatan dan waktu yang berbelit belit dalam pengurusan surat surat dan administrasi yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Berdasarkan indikator penelitian inovasi ASN di Tompaso Barat masih kurang dimana tidak ada metode baru yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di Kecamatan Tompaso Barat dimana untuk mengoptimalkan tugas diperlukan sinergitas dengan masyarakat.

3. Profesionalisme ASN ditinjau dari Responsifitas

Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu faktor yang menghambat adalah tidak profesionalnya kelancaran dan efektifitas birokrasi publik aparatur birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik Indonesia dapat dilihat dari banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi masyarakat di lapangan tentang pelayanan publik yang diselenggarakan

birokrasi. Lambannya birokrasi dalam merespon aspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural (red tape) merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi Pemerintahan di Indonesia.

Untuk merespon kebutuhan masyarakat diperlukan kejelian ASN dalam melihat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berikut adalah hasil wawancara dengan menurut beliau kemampuan ASN dalam melihat kebutuhan masyarakat sangat baik dan ASN telah mampu menyesuaikan dengan kegiatan kegiatan yang dilakukan baik secara tidak langsung maupun langsung tentunya prosedur pelayanan yang dilakukan selalu mengikuti aturan dengan membangun sinergitas dengan kabupaten dalam pelayanan dan mekanisme administrasi. Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru lewat perkembangan baru, pengetahuan baru dimana birokrasi harus merespon secara tepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsi diperlukan kesigapan agar aspirasi masyarakat dapat teratasi dengan baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat yang ada yakni PK” menurutnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan profesionalisme aparatur sipil negara sudah baik ini terlihat dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dimana dalam pelaksanaan tugas kecepatan dalam pengurusan administrasi dirasakan cepat dan sesuai dengan waktu yang ada

Berdasarkan indikator Responsifitas ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan beberapa informan responsifitas ASN sudah baik ini terlihat dengan berbagai program terlebih pemerintah kecamatan selalu

membangun koordinasi dengan Pemerintah desa dan Kabupaten menyangkut kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

1. Kreatifitas ASN yang ada di Tompaso Barat sudah sesuai dengan Standar operasional yang ada dalam pelaksanaan tugas pemerintahan baik dari segi pelayanan maupun keahlian yang dimiliki dalam setiap tugas yang dilaksanakan.
2. Inovasi ASN yang ada di kecamatan tompaso sudah baik lewat pelayanan yang diberikan akan tetapi ketersediaan sumber daya harus ditambah mengingat dalam tugas pemerintahan sering ada tugas baru sehingga sumber daya ASN perlu ditambah lagi.
3. Responsifitas ASN sudah baik ini terlihat dengan berbagai program terlebih pemerintah kecamatan selalu membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan kabupaten menyangkut kebutuhan masyarakat.
4. Pelaksanaan tugas Pemerintahan yang ada di kecamatan tompaso barat harus ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan fasilitas sehingga setiap program akan tercapai dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saran

1. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kemampuan dan keahlian perlu ditambah lagi lewat kegiatan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kreatifitas sehingga segala sesuatu yang menjadi tugas khususnya dalam setiap program akan terlaksana dengan cepat.
2. Dalam setiap tugas tentunya harus ada inovasi untuk menciptakan kerja yang efektif dan efisien oleh karena itu kemampuan ASN perlu

- menciptakan terobosan terobosan atau metode kerja yang efektif diantaranya langsung datang ke desa desa untuk melihat kebutuhan masyarakat dan mempermudah kegiatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak tentunya dibutuhkan kecepatan dari ASN untuk mengatasinya oleh karena itu ASN dikecamatan tompaso barat harus membangun sinergitas dengan pemerintahan desa agar supaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan akan berjalan dengan akurat dan efektif.
 4. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan tompaso barat harus ditingkatkan dengan penambahan fasilitas sehingga ketepatan dalam pelaksanaan tugas dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta Yogyakarta
- Ali, Eko Maulana, Kepemimpinan Transformasi dalam Birokrasi Pemerintahan, PT. Multi Cerdas Publishing, 2012
- Firdaus, Anita Muhamad, Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah, Jakarta; PT. Gaung Persada
- Handyaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Administrasi dan Management, Jakarta PT Gunung Agung
- Pramusinto, Agus, dkk. Governance Reform di Indonesia; mencari arah kelembagaan politik yang profesional, Yogyakarta; Gava Media, 2009
- Hadari, Nawawi, 2007, Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Kaelan, H. Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Yogyakarta; Paradigma, 2012
- Maschab, Mashuri, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta; Polgov, 2013
- Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Galia Indonesia, Jakarta.
-, 2000, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara Jakarta.
- Sugyono, Memahami Penelitian Kualitatif, alfabeta, Bandung 2010
- Suryaningrat, Bayu, 1992, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syafei, Inu Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT rineke citra, 2011
- Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, dilema dan tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wijaya, Haw, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta; Rajawali Press, 2012.